



**BENGKULU TENGAH**

**JUMAT, 25 AGUSTUS 2023**

**SUMBER BERITA**

<b>X</b>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

**518 Randis Menunggak Pajak, Sekda Evaluasi OPD**

**BENTENG** - Data UPTD Samsat Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng), masih banyak kendaraan dinas (randis) milik Pemkab Benteng yang masih menunggak pajak. Jumlahnya mencapai 518 unit.

Padahal ada program pemutihan pajak kendaraan bermotor dari Samsat, terhitung 1 Mei hingga 31 Agustus mendatang. Artinya, Pemkab Benteng belum maksimal menggunakan kesempatan ini untuk menuntaskan tunggakan pajak randis.

Kepala Bidang Penagihan UPTD Samsat Benteng, Gama Dharma Pala menjelaskan, 518 randis Pemkab Benteng yang menunggak pajak terdiri dari 410 kendaraan roda dua dan 108 kendaraan roda empat.

"Sudah hampir empat bulan program pemutihan pajak kendaraan ini berjalan, tetapi sedikit sekali kendaraan dinas yang membayar pajak. Hanya 102 randis, terdiri 38 kendaraan roda empat dan 64 kendaraan roda dua. Masih cukup banyak menunggak, mencapai 518 unit randis," jelasnya.

Menyikapi semua ini, pihaknya berharap Pemkab Benteng bisa membayarkan tunggakan pajak. Dalam kesempatan ini juga, Samsat Benteng mengajak seluruh masyarakat untuk segera membayar pajak kendara-

an bermotor yang masih menunggak sebelum tanggal 31 Agustus 2023.

"Kalau tak ada lagi perpanjangan waktu program pemutihan pajak kendaraan ini, maka setelah 31 Agustus, ketentuan kembali seperti biasa. Kendaraan yang menunggak pajak dikenakan denda. Jadi cukup disayangkan kesempatan ini iniin tak dimanfaatkan," tandasnya.

Sekda Benteng, Drs. Rachmat Riyanto, ST, M.AP dengan tegas menyatakan akan melakukan evaluasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Benteng.

Karena sebelumnya, Sekda sudah melayangkan surat imbauan kepada seluruh OPD agar bisa membayar pajak kendaraan yang masih menunggak.

"Surat tersebut saya sendiri yang menandatangani. Ternyata masih banyak yang belum membayar pajak. Apabila beberapa hari ke depan pajak kendaraan dinas tersebut tak kunjung dibayarkan, akan saya lakukan evaluasi OPD," tegasnya.

Membayar pajak sudah menjadi kewajiban, apalagi randis milik Pemda dibeli menggunakan uang negara. "Mengapa tidak dibayarkan. Sebenarnya tak ada alasan, mengingat anggaran untuk membayar pajak randis sudah disediakan di setiap OPD," pungkas Sekda. (jee)